

## **KESIAPAN SEKOLAH PADA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS MENUJU ERA SOCIETY 5.0**

**Bayu Wisnanda<sup>1</sup>, Riki Anggara Putra<sup>2</sup>, Dahlia<sup>3</sup>, Afriadi Ramadhani Rakhman<sup>3</sup>**  
Universitas Lambung Mangkurat<sup>1,2,3,4</sup>  
wisnandabayu@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesiapan sekolah menengah atas dalam mengimplementasikan program merdeka belajar menuju era *society 5.0*. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur secara kualitatif dengan fokus pembahasan tentang kurikulum merdeka dan program merdeka belajar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis literatur sepuluh jurnal nasional dan lima internasional, serta pedoman kebijakan merdeka belajar melalui Kemendikbud, peraturan perundang-undangan negara serta bacaan internet. Hasil dari penelitian ini merumuskan cara menghadapi masyarakat 5.0 dalam pendidikan yaitu: pemerintah harus berusaha meningkatkan pemerataan pembangunan dan keterbukaan memperluas koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia; pemerintah harus mampu mensinkronkan pendidikan dan industri agar nantinya lulusan perguruan tinggi dan sekolah dapat bekerja di bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan industri untuk mengurangi pengangguran di Indonesia pada masa mendatang. Simpulan, adapun aspek positif program merdeka belajar adalah guru lebih leluasa berkreasi dalam mengajar sebanyak mungkin dan mengenal minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Kerjasama baik antara guru, penyelenggara sekolah, dinas, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam program merdeka belajar dapat mempercepat tercapainya tujuan sistem pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** *Era Sosial 5.0, Kurikulum Merdeka Belajar, Sekolah Menengah Atas*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyse how the readiness of senior high schools in implementing the independent learning program towards the era of society 5.0. The method in this research uses a qualitative literature study with a focus on the discussion of the independent curriculum and the independent learning programme. Data collection techniques were carried out by identifying and analysing literature from 10 national and 5 international journals, as well as independent learning policy guidelines through the Ministry of Education and Culture, state laws and regulations and internet readings. The results of this study formulate how to deal with society 5.0 in education: The government must try to increase equitable development and openness to expand internet connections throughout Indonesia; The government must be able to synchronise education and industry so that later college and school graduates can work in their fields and in accordance with the criteria needed by industry to reduce unemployment in Indonesia in the future. The positive aspects of the independent learning programme are that teachers are more free to be creative in teaching as much as possible and get to know the interests, talents, needs, and abilities of students. Good cooperation between teachers, school administrators, agencies, parents, and other stakeholders in the independent learning programme can accelerate the achievement of the goals of the national education system.*

*Keywords: Social Era 5.0, Independent Learning Curriculum, Senior High School*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu untuk menciptakan peradaban yang lebih baik bagi semua orang. Beberapa waktu yang lalu muncul istilah revolusi 4.0 yang menyoroti banyak aspek baru dari teknologi, dan segera setelah itu muncul juga istilah social 5.0 yang menekankan pada manusia atau human centered di dunia terus berkembang (Haqqi & Wijayati, 2019). Masyarakat era 5.0 lahir bukan tanpa alasan melainkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, salah satunya bidang pendidikan. Perkembangan masyarakat 5.0 memiliki karakteristik yang berbeda. (Kosasih, 2020)

Dengan hadirnya social Era 5.0, Indonesia tentunya akan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya dengan terus mengumpulkan informasi, serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menunjang eksistensinya agar dapat bersaing di era yang kompetitif. dunia global yang lebih kompleks (Hadiapurwa et al., 2021). Ini adalah tantangan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dalam pembelajaran di kelas, sangat penting guru menerapkan model pembelajaran saat mengajar. Dengan berkembangnya dunia pendidikan abad 21 yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran menurut sistem konvensional (tradisional) tidak lagi dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak tantangan yang harus dikuasai siswa terutama berupa penguasaan keterampilan abad 21 (Sofiah et al., 2020). Hal ini sejalan dengan apa yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah terkhusus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu mengenai merdeka belajar.

Penelitian sebelumnya oleh McKinsey dalam Ningrum, (2016), menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sistem pendidikan Indonesia yang dinilai masih kurang efektif karena tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebelum era Society 5.0 di bidang pendidikan, pemerintah mulai menerapkan program belajar mandiri. Program ini dibuat untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, siswa harus dipersiapkan untuk dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kebutuhan zaman.

Program merdeka belajar lahir dari keluhan orang tua terhadap sistem pendidikan nasional saat ini. Kata "kemerdekaan" memiliki tiga dimensi: Kehendak bebas berarti berani memerintah dan menciptakan kebaikan yang dapat diterima secara sosial; Kebebasan berpikir atau kebebasan berekspresi, yaitu melarang, mengkritik, membela yang salah; Semangat bebas, tak kenal takut (Mansur, 2018). Dalam konteks merdeka belajar proses belajar harus dilakukan dengan mengembangkan kemauan dan semangat, mengakui hak atas kebebasan berpikir dan tanpa rasa takut dalam bentuk apapun.

Pengalaman pembelajaran yang telah diberikan oleh merdeka belajar yang kemudian telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa melalui kualitas pembelajaran yang diterapkan oleh guru kepada siswa agar tercapainya tujuan dari sistem pendidikan nasional dan mampu menciptakan manusia yang unggul secara global serta menjadi pemecah masalah bagi kehidupan nyata.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada studi literatur yang berfokus pada kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan program merdeka belajar di sekolah menengah atas menuju era sosial 5.0, dalam mengkaji referensi Secara kualitatif yang berfokus pada pembahasan topik "kurikulum merdeka dan program merdeka belajar dalam menghadapi era disrupsi dan era *society 5.0*" dari berbagai sumber bacaan atau referensi berupa jurnal, buku atau internet yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis sebelumnya literatur yang diteliti berasal dari sepuluh jurnal nasional dan lima internasional, serta pedoman kebijakan merdeka belajar melalui Kemendikbud, peraturan perundang-undangan negara dan bacaan internet. Langkah-langkah yang akan ditempuh penulis untuk mengumpulkan bacaan, yaitu: Mengumpulkan data terkait topik yang dibahas; Menganalisis literatur yang dibaca dan menyimpulkan Topik utama terkait kebijakan program merdeka belajar untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan era sosial 5.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan, antar perangkat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri yang tergabung menjadi suatu keseluruhan dan masing masing perangkat menjadi penunjang untuk perangkat lainnya (Habe & Ahiruddin, 2017). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Kemendikbud, 2019; Tohir, 2019). Sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan mengelola pendidikan secara efektif untuk menjawab tantangan perubahan kebutuhan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan reformasi pendidikan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim dalam Pidatonya mengatakan Bahwa Tantangan lain yang harus dihadapi oleh pendidikan di Indonesia adalah peringkat PISA (*Programme for International Student Assessment*) negara ini yang masih jauh dari harapan, Hasil survei PISA 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat keenam dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan Matematika mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71. Sementara itu menurut World top20.org, (2023), Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan lima tingkat pendidikan. Inilah rincian persentase lima tingkat pendidikan di Indonesia.

- 1) Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini: 68%
- 2) Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100%
- 3) Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah: 91.19%
- 4) Tingkat kelulusan SMA: 78%
- 5) Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi: 19%

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya peningkatan

pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Dalam RI, (2003), UU Nomor 20 Tahun 2003 Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Program tersebut mencerminkan falsafah hidup bangsa, dimana arahan bentuk kehidupan ini akan ditentukan oleh program yang sedang digunakan oleh bangsa tersebut.

Sebagai faktor penting yang mengubah dunia pendidikan, keberadaan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis. Tercatat sejak tahun 1947, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan. Berikut adalah berbagai program yang telah dilaksanakan di Indonesia: Kurikulum pertama disebut Rentjana Pelajaran 1947, Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 (Perbaikan kurikulum 1975), Kurikulum 1994 dan Tambahan Kurikulum 1999, Kurikulum 2004 (Kurikulum/KBK), Kurikulum 2006 (Kurikulum Jenjang/KTSP) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2013. Perubahan kurikulum tidak hanya menunjukkan dinamika pendekatan pedagogis, sosiologis, dan politik yang dialami komunitas tertentu. Sama pentingnya untuk mengkaji bagaimana perubahan kurikulum ini berdampak pada proses pembelajaran dan pengaruhnya terhadap mereka yang secara langsung berada di puncak proses pembelajaran di sekolah. Hal ini membuka pintu bagi munculnya dampak positif dan negatif dari perubahan kurikulum. Salah satu hal positifnya adalah tingginya persentase pekerjaan rumah yang dianggap berhasil diselesaikan di kelas yang melakukan perubahan kurikulum dibandingkan dengan kelas yang tidak melakukan perubahan kurikulum (Li & Ni, 2011).

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menetapkan program atau kebijakan pendidikan baru di Indonesia adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memiliki 4 program utama. Empat program utama tersebut adalah: Penilaian Komprehensif Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan penilaian keterampilan minimum dan survei kepribadian, penyederhanaan penyusunan rencana pelaksanaan sekolah (RPP) dan sistem zonasi pendaftaran masuk baru (PPDB) yang lebih fleksibel .

Society 5.0 memiliki perbedaan yang mencolok dari revolusi 4.0, 3.0 dan 2.0. Namun masyarakat 5.0 masih memiliki dasar dari revolusi sebelumnya. Perbedaan dengan revolusi 4.0 terletak pada aspek networking atau cara penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Lifestyle 5.0 beradaptasi dengan revolusi 3.0, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis masyarakat pada revolusi 2.0 (Salgues, 2018). Atas dasar ini, society 5.0 dapat dianggap sebagai pelengkap bentuk revolusioner sebelumnya. Menurut Kemendikbud, (2019), revolusi industri ketiga menjadi landasan bagi revolusi industri 4.0 saat ini. Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang lahir untuk menjawab fenomena yang sedang berlangsung akibat revolusi industri 4.0. Era revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang beragam terhadap pendidikan di Indonesia. Di bidang pendidikan, Society 5.0 memungkinkan robot dan manusia berkolaborasi secara efektif (Nastiti & Abdu, 2020). Namun dalam hal ini, manusia harus beradaptasi dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk hidup berdampingan dengan teknologi.

### **Upaya yang harus Dilakukan Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0 pada Dunia Pendidikan terkhusus pada implementasi Merdeka Belajar**

Society 5.0 atau bisa dipahami sebagai Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang. Konsep sosial 5.0 tidak terbatas pada faktor produksi tetapi juga memecahkan masalah sosial dengan bantuan mengintegrasikan ruang

fisik dan virtual (Skobelev & Borovik, 2017). Society 5.0 memiliki konsep teknologi big data yang dikumpulkan oleh *Internet of Things* (IoT) (Hayashi) yang diatur oleh kecerdasan buatan (AI). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi masyarakat 5.0 yaitu cara pertama melihat dalam infrastruktur, pemerintah harus berusaha meningkatkan pemerataan pembangunan dan keterbukaan memperluas koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia, karena Seperti yang kita ketahui, saat ini tidak semua wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan koneksi internet.

Kedua, dari segi sumber daya manusia, guru membutuhkan keterampilan digital dan berpikir kreatif. Zulkifar Alimuddin, Direktur Hafecs (*Highly Functioning Education Consulting Services*) berpendapat bahwa di era Society 5.0 (Society 5.0), guru perlu lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Ketiga, pemerintah harus mampu mensinkronkan pendidikan dan industri agar nantinya lulusan perguruan tinggi dan sekolah dapat bekerja di bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan industri untuk mengurangi pengangguran di Indonesia ke depan. Keempat, menerapkan teknologi sebagai alat untuk kegiatan belajar mengajar karena Konsep literasi digital tidak hanya bertumpu pada “membaca” namun juga peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan informasi- informasi digital yang diperoleh (Aoun, 2017; Camilleri, 2018) untuk keperluan yang benar, menghindari hoax.

Pemanfaatan merdeka belajar memerlukan perencanaan yang terstruktur dan strategis yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah harus memberikan arahan khusus kepada guru tentang kebijakan merdeka belajar, agar mereka mempersiapkan pembelajarannya sesuai dengan kebijakan yang ada. Harapan dari kebijakan kebebasan belajar adalah guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa dapat belajar lebih banyak. Namun program pendidikan Merdeka Belajar juga memiliki banyak aspek positif dan negatif yang terjadi baik di sekolah maupun di masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, berbagai pendapat muncul dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus siap melaksanakan kebijakan belajar mandiri dan berperan penting di dalamnya. Kemauan guru menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan belajar mandiri. Hal ini karena guru terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan belajar mandiri. Karena sebaik apapun kebijakan dirumuskan, jika guru pelaksananya tidak memiliki keterampilan yang baik dan kesiapan yang matang maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Peran sekolah dalam persiapan pelaksanaan belajar mandiri sangatlah penting. Peneliti berharap kebijakan belajar mandiri ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuan otonomi dapat tercapai jika mereka yang terlibat dalam pendidikan, yaitu. kepala sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa, menjadi aktif.

Sarana dan prasarana juga sangat mendukung keberhasilan implementasi kurikulum mandiri di sekolah. Sarana dan prasarana yang lengkap sangat mendukung pelaksanaan program Merdeka belajardi sekolah, terutama ketersediaan perangkat IT. Bahan ajar seperti Buku sudah disiapkan oleh Kemdikbud, guru hanya tinggal menyusun. Ketika diterapkan, tidak dapat dipungkiri akan melibatkan berbagai platform pembelajaran sebagai media pembelajaran, karena sekolah penggerak merupakan awal dari pergeseran menuju digitalisasi sekolah (Ling, 2020; Patilima, 2022).

Proses pembelajaran program merdeka belajar di sekolah Penggerak mengacu pada profil siswa pancasila dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. meningkatkan profil siswa pancasila dan kegiatan

ekstrakurikuler. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 162 Tahun 2021 bahwa kerangka dasar meliputi:

- a) struktur kurikulum;
- b) hasil belajar; dan
- c) Prinsip Pembelajaran dan Penilaian.

Dalam kurikulum merdeka, setiap kegiatan harus mengarah ke proyek yang mengacu pada profil siswa pancasila dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian. Dengan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, guru lebih leluasa berkreasi dalam mengajar sebanyak mungkin dan lebih mengenal minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus mampu menggerakkan, membimbing dan menginspirasi guru yang ingin berubah menjadi lebih baik. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara guru, penyelenggara sekolah, dinas, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program merdeka belajar di sekolah penggerak dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

## SIMPULAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun cara yang dapat dilakukan dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi masyarakat 5.0 yaitu cara pertama melihat dalam infrastruktur, pemerintah harus berusaha meningkatkan pemerataan pembangunan dan keterbukaan memperluas koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia dan pemerintah harus mampu mensinkronkan pendidikan dan industri agar nantinya lulusan perguruan tinggi dan sekolah dapat bekerja di bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan industri untuk mengurangi pengangguran di Indonesia ke depan.

Program Merdeka Belajar memiliki banyak aspek positif dan negatif yang terjadi baik di sekolah maupun di masyarakat. Guru lebih leluasa berkreasi dalam mengajar sebanyak mungkin dan mengenal minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Kerjasama baik antara guru, penyelenggara sekolah, dinas, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program Merdeka belajar dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aoun, J. E. (2017). *Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*.
- Camilleri, P. (2018). Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence. *Journal of Education for Teaching*, 44(4), 519–520. <https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1500792>
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Hadiapurwa, A., Riani, P., Yulianti, M. F., & Yuningsih, E. K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar untuk Membekali Kompetensi Generasi Muda dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*,

- 4(1), 115–129. <https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.3140>
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Society 5.0 Sebuah Integrasi Ruang. In *Terobosan Teknologi Dan Transformasi Kehidupan Di Era Disruptif*, Yogyakarta, QUADRANT, h.
- Kemendikbud, K. (2019). Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar. In *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar>
- Kosasih, A. (2020). Konsep Pendidikan Nilai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/196509171990011-ACENG\\_KOSASIH/Konsep\\_Pend.\\_Nilai.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196509171990011-ACENG_KOSASIH/Konsep_Pend._Nilai.pdf)
- Li, Q., & Ni, Y. (2011). Impact of curriculum reform: Evidence of change in classroom practice in mainland China. *International Journal of Educational Research*, 50(2), 71–86. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.06.003>
- Ling, L. (2020). Education supply chain in the era of Industry 4.0. *Systems Research and Behavioral Science*, 37(4), 579–592. <https://doi.org/10.1002/sres.2702>
- Mansur, R. (2018). Belajar Jalan Perubahan Menuju Kemajuan. *Jurnal Vicratina*, 3(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/1075>
- Nastiti, F., & Abdu, A. (2020). Kajian: Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61–66. <https://doi.org/10.17977/um039v5i12020p061>
- Ningrum, E. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan informasi. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681>
- Patilima, S. (2022). Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/psnnpd/article/view/1069>
- RI, P. (2003). *Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas*. JDIIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. [https://piaud.uin-suka.ac.id/media/dokumen\\_akademik/43\\_20210506](https://piaud.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/43_20210506)
- Salgues, B. (2018). Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools. In *Wiley*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119507314>
- Skobelev, P. O., & Borovik, S. Y. (2017). On the way from Industry 4.0 to Industry 5.0: From Digital Manufacturing to Digital Society. *International Scientific Journal*, 2(6). <https://stumejournals.com/journals/i4/2017/6/307>
- Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis karakteristik sains teknologi masyarakat (STM) sebagai model pembelajaran: sebuah studi literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/2611/>
- Tohir, M. (2019). Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar. In *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://osf.io/preprints/osf/67rcq>
- World top20.org. (2023). *International Education Database*. World Top20.Org. <https://worldtop20.org/education-database/>